

KORPORATISME NEGARA DAN EKONOMI PRIVATISASI TERHADAP PEMBANGUNAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Al Ghozaly Irzha Bagus Syahputra

Afiliasi; UIN Sunan Ampel Surabaya

Syahputra@gmail.com

Alya Syifa Sinaroja

Afiliasi; UIN Sunan Ampel Surabaya

alyasyifasinar01@gmail.com

Valiant Rizqi Widyoseno

Afiliasi; UIN Sunan Ampel Surabaya

Widyoseno@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas kompleksitas interaksi antara korporatisme negara dan kebijakan ekonomi privatisasi dalam konteks pembangunan suatu negara, dengan fokus pada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan publik, dan ketidaksetaraan. Melalui analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder, penelitian ini menggambarkan bahwa korporatisme negara cenderung menciptakan stabilitas ekonomi namun juga berisiko terhadap korupsi dan ketidaksetaraan. Sebaliknya, kebijakan ekonomi privatisasi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi tetapi berpotensi menghadirkan tantangan terkait layanan publik dan ketidaksetaraan akses. Era globalisasi menambah dinamika kompleks, mengharuskan negara mencari keseimbangan yang tepat. Konflik potensial antara kedua pendekatan tersebut menekankan perlunya perencanaan dan regulasi yang bijaksana guna mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang interaksi tersebut, memberikan landasan untuk pengambilan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan.

kata kunci: *Korporatisme negara; Ekonomi privatisasi; Pembangunan; Ketidaksetaraan; Globalisasi*

Abstract

This research addresses the complexity of the interaction between state corporatism and privatized economic policies in the context of a country's development, focusing on their impact on economic growth, public policy and inequality. Through qualitative analysis using secondary data, this study illustrates that state corporatism tends to create economic stability but also

Copyright: © 2024. Al Ghozaly Irzha Bagus Syahputra, Alya Syifa Sinaroja, Valiant Rizqi Widyoseno.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

risks corruption and inequality. Conversely, privatized economic policies can improve economic efficiency but potentially present challenges related to public services and inequality of access. Globalization adds complex dynamics, requiring states to find the right balance. The potential conflict between the two approaches emphasizes the need for thoughtful planning and regulation to achieve sustainable and inclusive development. This research provides in-depth insights into such interactions, providing a foundation for sustainability-oriented policy-making.

Keywords: *State corporatism; Privatized economy; Development; Inequality; Globalization*

Article History: Received 08 January 2024, Revised 01 July 2024, Accepted 01 July 2024, Available online 30 April 2024

Pendahuluan

Korporatisme Negara dan Ekonomi Privatisasi merupakan dua fenomena yang secara signifikan memengaruhi pembangunan negara dan kebijakan publik di berbagai belahan dunia. Latar belakang kompleks ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup dimensi politik, sosial, dan budaya yang saling terkait.¹ Dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak era globalisasi dimulai, negara-negara di seluruh dunia telah mengalami transformasi mendasar dalam cara mereka mengelola perekonomian dan menjalankan urusan publik.

Korporatisme negara mengacu pada model pemerintahan di mana kepentingan utama negara berkolaborasi dengan sektor korporat untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini seringkali melibatkan keterlibatan aktif pemerintah dalam mengatur ekonomi, mendukung perusahaan swasta, dan membentuk kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak. Model ini dapat ditemui dalam berbagai bentuk, mulai dari negara yang lebih otoriter hingga yang lebih demokratis. Korporatisme negara dapat memberikan stabilitas ekonomi dan politik, tetapi juga dapat menimbulkan risiko korupsi dan kepentingan kelompok tertentu yang mendominasi.

¹ Sari, R. P., & Suharto, E. Analisis kebijakan privatisasi BUMN dalam perspektif ekonomi politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), (2018): 1-12.

Di sisi lain, fenomena ekonomi privatisasi melibatkan transfer tanggung jawab dari sektor publik ke sektor swasta dalam penyediaan layanan dan aset publik. Privatisasi seringkali dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan keseimbangan fiskal. Namun, dampaknya sering menjadi kontroversial karena dapat mengarah pada ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, privatisasi juga dapat menciptakan ketidakpastian pekerjaan dan meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi jika tidak diatur dengan baik.

Pengaruh korporatisme negara dan ekonomi privatisasi terhadap pembangunan negara sangat berkaitan dengan pendekatan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.² Di negara-negara dengan kebijakan korporatisme yang kuat, pemerintah cenderung memainkan peran sentral dalam mengarahkan ekonomi dan mendukung sektor korporat. Hal ini dapat menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga dapat memunculkan kecenderungan proteksionisme dan ketidaksetaraan.

Sementara itu, negara-negara yang menganut kebijakan privatisasi cenderung memberikan ruang lebih besar bagi inisiatif swasta dalam penyediaan layanan publik dan pengelolaan aset. Meskipun tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, privatisasi seringkali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keadilan sosial dan menghindari monopoli yang merugikan konsumen. Dalam beberapa kasus, privatisasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan peningkatan disparitas ekonomi dan ketidaksetaraan sosial.

Namun, pergeseran menuju korporatisme negara atau ekonomi privatisasi tidak selalu bersifat mutlak. Banyak negara mengadopsi pendekatan campuran, yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua model tersebut. Pendekatan ini mencerminkan usaha untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan publik dan swasta, serta

² Ari Dwipayana. "Korporatisme Negara dan Privatisasi: Dampak Terhadap Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), (2022): 123-142.

untuk mengatasi tantangan kompleks dalam mengelola pembangunan dan kebijakan publik.

Adopsi korporatisme negara atau ekonomi privatisasi juga sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan ekonomi setempat, serta tekanan global seperti arus globalisasi dan tuntutan pasar bebas. Negara-negara berkembang seringkali dihadapkan pada tekanan untuk mengadopsi model ekonomi yang lebih terbuka dan bersaing, sementara negara-negara maju mungkin mencoba menyeimbangkan antara mempertahankan kebijakan proteksionis untuk melindungi industri dalam negeri dan berpartisipasi dalam pasar global.³

Peran aktor non-pemerintah, termasuk masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, juga menjadi krusial. Mereka dapat menjadi katalisator perubahan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penerapan korporatisme negara atau ekonomi privatisasi. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta harus mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia agar dapat menciptakan dampak positif bagi pembangunan negara dan kebijakan publik secara menyeluruh.

Oleh karena itu, korporatisme negara dan ekonomi privatisasi menggambarkan dinamika yang terus berkembang dalam perekonomian global dan tata kelola publik. Pemahaman mendalam tentang interaksi antara kebijakan, aktor, dan kondisi kontekstual sangat penting untuk mengarahkan arah pembangunan negara dan kebijakan publik yang berkelanjutan dan inklusif.

Kajian Literatur

Korporatisme Negara

Korporatisme negara merujuk pada model pemerintahan di mana negara berkolaborasi secara erat dengan sektor korporat atau bisnis

³ Mustofa, A. EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN: KEBIJAKAN PRIVATISASI DAN ALIANSI POLITIK BUMN. Unitomo Press. 2020.

untuk mencapai tujuan bersama.⁴ Dalam sistem ini, pemerintah berfungsi sebagai pengatur dan mitra strategis bagi perusahaan-perusahaan swasta, seringkali melalui asosiasi industri atau organisasi perwakilan bisnis. Korporatisme negara dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari negara yang lebih otoriter hingga yang lebih demokratis.

Pemerintah dalam korporatisme negara terlibat dalam pembuatan kebijakan ekonomi, regulasi bisnis, dan pembagian sumber daya ekonomi. Kerjasama erat antara sektor publik dan swasta diharapkan meningkatkan stabilitas ekonomi, mengurangi konflik antara buruh dan pengusaha, serta memastikan adanya koordinasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Meskipun korporatisme negara dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan kebijakan yang koheren, model ini juga rentan terhadap risiko korupsi, proteksionisme, dan kepentingan kelompok tertentu yang mendominasi. Dalam beberapa kasus, korporatisme negara dapat memunculkan ketidaksetaraan akses terhadap peluang ekonomi dan menghadirkan tantangan terkait keadilan sosial. Oleh karena itu, peran pemerintah dan regulasi yang efektif sangat penting dalam memitigasi potensi risiko dan menyeimbangkan kepentingan yang beragam dalam masyarakat.

Ekonomi Privatisasi

Ekonomi privatisasi adalah pendekatan di mana pemerintah mentransfer tanggung jawab dan kepemilikan aset publik kepada sektor swasta. Dalam model ini, perusahaan dan individu swasta mengambil alih operasi dan manajemen berbagai sektor, termasuk industri, layanan, dan infrastruktur yang sebelumnya dikelola oleh entitas pemerintah. Tujuan utama ekonomi privatisasi adalah meningkatkan efisiensi, inovasi, dan produktivitas dengan memasukkan prinsip-prinsip pasar ke dalam kegiatan ekonomi.⁵

⁴ Wiranta, S. Privatisasi BUMN dan perannya terhadap pembangunan ekonomi nasional: Kasus PT. Garuda. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(1), (2012): 1-20.

⁵ Wirawan, A. Analisis dampak privatisasi BUMN terhadap kinerja perusahaan dan perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(1), (2019): 1-10.

Dengan memberikan insentif untuk investasi dan persaingan, diharapkan bahwa ekonomi privatisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih dinamis, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun berpotensi memberikan keuntungan seperti efisiensi operasional dan peningkatan daya saing, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang akses masyarakat terhadap layanan dasar dan risiko ketidaksetaraan ekonomi jika tidak diatur dengan baik.

Pembangunan Negara

Pembangunan negara mencakup serangkaian upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan suatu negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan infrastruktur. Aspek ekonomi pembangunan negara melibatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas. Di samping itu, pembangunan sosial berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.⁶ Pembangunan politik melibatkan penguatan institusi dan tata kelola yang baik, sementara pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menciptakan basis yang solid untuk pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Pembangunan negara bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan keadilan sosial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik mencakup serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial,

⁶ Muchayat, M. Politik dan ekonomi kebijakan privatisasi badan usaha milik negara (BUMN) (politics and economics of privatization in the state-owned enterprise). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(3), (2017): 369-384.

ekonomi, dan politik. Kebijakan publik dapat mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan keamanan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan, serta mempromosikan kepentingan umum. Proses kebijakan publik melibatkan identifikasi masalah, perumusan solusi, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan implementasi langkah-langkah konkret. Dalam konteks global, kebijakan publik juga mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas internasional.⁷ Oleh karena itu, kebijakan publik menjadi instrumen utama dalam membentuk arah dan karakteristik perkembangan suatu negara.

Hasil dan Pembahasan

Korporatisme Negara Memengaruhi Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Dan Kebijakan Publik Yang Diterapkan

Korporatisme negara memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi, kebijakan publik, stabilitas politik, dan ketidaksetaraan ekonomi suatu negara. Fenomena ini mencerminkan keterlibatan aktif pemerintah dalam mengatur dan berkolaborasi dengan sektor korporat untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu dampak utama korporatisme negara terletak pada pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan adanya keterlibatan pemerintah dalam mengarahkan sektor ekonomi, korporatisme negara dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan sektor industri, dan mengurangi ketidakpastian bisnis. Pemerintah dapat memberikan insentif, dukungan keuangan, dan regulasi yang mendukung pengembangan sektor-sektor kunci, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan inovasi.⁸

⁷ Trijono, L. Pembangunan sebagai Perdamaian: rekonstruksi Indonesia pasca-konflik. Yayasan Obor Indonesia. 2007.

⁸ Sari, R. P., & Suharto, E. Analisis kebijakan privatisasi BUMN dalam perspektif ekonomi politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), (2018): 1-12.

Namun, dampak korporatisme negara tidak hanya terbatas pada aspek positif pembangunan ekonomi. Keterlibatan pemerintah yang berlebihan dalam sektor ekonomi juga dapat menciptakan risiko korupsi, proteksionisme, dan pengalihan sumber daya yang tidak efisien. Keberadaan monopoli atau oligopoli di sektor tertentu dapat merugikan persaingan, menghambat inovasi, dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam konteks korporatisme negara perlu diatur secara cermat untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut dan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain pembangunan ekonomi, korporatisme negara juga memiliki dampak besar pada kebijakan publik. Dalam model ini, pemerintah seringkali menjadi pihak yang sangat terlibat dalam pembuatan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan regulasi ekonomi, pajak, dan subsidi. Keputusan-keputusan ini dapat memiliki dampak langsung pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang kuat dalam konteks korporatisme negara cenderung memainkan peran sentral dalam menentukan arah kebijakan ekonomi, yang dapat berdampak pada berbagai sektor dan kelompok masyarakat.

Korporatisme negara dapat menciptakan stabilitas politik dengan menciptakan konsensus antara pemerintah dan sektor korporat, ada potensi risiko dalam hal dominasi kepentingan kelompok tertentu. Ketidaksetaraan akses ke peluang ekonomi dan politik dapat muncul jika kebijakan yang diambil lebih memihak pada sektor tertentu atau kelompok tertentu, meninggalkan kelompok-kelompok lain di pinggiran. Terutama dalam konteks globalisasi, keputusan pemerintah yang mendukung kepentingan korporat tertentu dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan ketegangan sosial.

Stabilitas politik suatu negara juga dapat dipengaruhi oleh korporatisme negara, terutama jika pemerintah tidak berhasil menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Jika ketidaksetaraan ekonomi dibiarkan tanpa penanganan, ini dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial, protes, atau bahkan konflik

politik. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan partisipasi masyarakat dalam implementasi korporatisme negara untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan secara merata dan stabilitas politik tetap terjaga.

Implementasi Kebijakan Ekonomi Privatisasi Berkontribusi Terhadap Perkembangan Negara

Implementasi kebijakan ekonomi privatisasi telah menjadi pusat perhatian dalam kerangka perkembangan negara, mengundang debat tentang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, ketersediaan layanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan distribusi kekayaan. Secara umum, kebijakan privatisasi bertujuan meningkatkan efisiensi, inovasi, dan produktivitas melalui keterlibatan lebih besar sektor swasta dalam penyediaan layanan dan manajemen aset publik.

Perkembangan negara melalui implementasi kebijakan ekonomi privatisasi dapat tercermin dalam peningkatan investasi asing dan lokal, penciptaan lapangan kerja baru, dan pertumbuhan sektor bisnis. Dengan memberikan insentif kepada sektor swasta, pemerintah berharap mendapatkan manfaat ekonomi jangka panjang dan diversifikasi ekonomi yang lebih baik. Privatisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif dan responsif terhadap perubahan pasar, mendorong inovasi, dan meningkatkan efisiensi operasional.⁹

Namun, dampak privatisasi terhadap ketersediaan layanan publik menjadi fokus kritik. Proses privatisasi sering diikuti oleh penarikan pemerintah dari penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketika perusahaan swasta memasuki ranah ini, tujuannya seringkali terfokus pada keuntungan finansial, yang dapat mengakibatkan peningkatan biaya akses dan penurunan ketersediaan layanan untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu.

⁹ Kurniawan, N. I. Globalisasi & negara kesejahteraan: perspektif institusionalisme. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada. 2009.

Dampak privatisasi dapat bervariasi tergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan yang diatur oleh sektor swasta. Meskipun dapat terjadi peningkatan kualitas layanan dan pilihan konsumen, terdapat potensi masyarakat kurang mampu terpinggirkan karena harga yang lebih tinggi atau akses terbatas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan privatisasi diimbangi dengan langkah-langkah perlindungan sosial yang efektif dan memperhatikan keadilan distributif agar manfaatnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Privatisasi dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi jika tidak diatur dengan baik. Penjualan aset publik kepada pihak swasta seringkali mengakibatkan akumulasi kekayaan yang tidak merata, memperkuat posisi kelompok elit, dan menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan mekanisme pengawasan dan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa privatisasi tidak hanya memberikan keuntungan kepada segelintir orang atau kelompok.

Dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan ekonomi privatisasi berkontribusi terhadap perkembangan negara, perlu diperhatikan bahwa pendekatan ini tidak selalu bersifat one-size-fits-all. Konteks ekonomi, politik, dan sosial suatu negara sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan privatisasi. Oleh karena itu, perlu ada adaptasi dan kustomisasi kebijakan privatisasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap negara.

Interaksi Antara Korporatisme Negara Dan Kebijakan Ekonomi Privatisasi Dapat Membentuk Dinamika Ekonomi Dan Kebijakan Publik Suatu Negara

Interaksi antara korporatisme negara dan kebijakan ekonomi privatisasi menciptakan dinamika kompleks yang berpengaruh signifikan terhadap ekonomi dan kebijakan publik suatu negara, terutama dalam era globalisasi saat ini. Dua pendekatan ini memiliki karakteristik yang seringkali saling bertentangan, dan interaksi di

antara keduanya dapat membentuk landasan kebijakan yang unik, menciptakan tantangan dan peluang yang bersamaan.

Korporatisme negara, dengan keterlibatan pemerintah yang kuat dalam mengarahkan ekonomi, dapat menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Pemerintah, bekerjasama dengan sektor korporat, dapat merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor kunci, memberikan insentif untuk investasi, dan menciptakan iklim usaha yang stabil. Namun, ketika interaksi ini tidak diatur dengan baik, potensi risiko korupsi, ketidaksetaraan ekonomi, dan proteksionisme dapat muncul.¹⁰

Di sisi lain, kebijakan ekonomi privatisasi menyoroti peran sektor swasta dalam penyediaan layanan dan manajemen aset publik. Privatisasi diharapkan meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif. Dalam era globalisasi, di mana pasar dan perusahaan bersaing secara internasional, privatisasi dapat membantu negara mengintegrasikan diri mereka ke dalam ekonomi global dengan lebih baik. Namun, risiko terkait dengan kurangnya regulasi yang memadai dan dominasi sektor swasta terhadap kepentingan publik dapat muncul.

Interaksi antara dua pendekatan ini terasa paling kuat ketika negara berusaha untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kontrol pemerintah dan inisiatif swasta. Kesulitan ini diperparah dalam era globalisasi, di mana tekanan untuk membuka pasar dan memperluas investasi asing dapat mengarah pada percepatan kebijakan privatisasi. Negara juga harus mempertimbangkan bagaimana menyelaraskan kebijakan ekonomi nasional mereka dengan tuntutan pasar global yang bersifat kompetitif dan dinamis.

Konflik potensial antara korporatisme negara dan kebijakan ekonomi privatisasi muncul dalam ketidaksesuaian tujuan dan prioritas. Sementara korporatisme negara sering kali mengejar tujuan

¹⁰ Dwi Haryono. "Korporatisme Negara dan Privatisasi: Implikasi Terhadap Perekonomian Nasional." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 14(2), (2021): 121-138.

pembangunan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan ekonomi privatisasi seringkali terfokus pada pencapaian efisiensi dan profitabilitas. Oleh karena itu, mencapai keseimbangan yang memadai di antara keduanya menjadi tantangan, khususnya ketika tujuan pembangunan yang berkelanjutan harus dijaga.

Penting untuk diakui bahwa ketegangan antara korporatisme negara dan kebijakan ekonomi privatisasi dapat diatasi melalui perencanaan kebijakan yang cermat dan implementasi yang bijaksana. Mekanisme regulasi yang efektif, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dan sektor swasta dapat membantu menciptakan keseimbangan yang diperlukan. Partisipasi masyarakat sipil juga memegang peran penting dalam mendesak agar kebijakan mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam era globalisasi, di mana interdependensi ekonomi semakin terasa, negara-negara harus bijaksana dalam menavigasi antara korporatisme negara dan kebijakan ekonomi privatisasi. Kesadaran terhadap dampak global dan keseimbangan antara kepentingan nasional dan internasional perlu diperhitungkan. Seiring dengan itu, adopsi prinsip-prinsip keberlanjutan dan inklusi dalam perumusan kebijakan dapat membantu memastikan bahwa interaksi antara kedua pendekatan tersebut berkontribusi pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

Kesimpulan

Dalam implementasi korporatisme negara, peran aktif pemerintah dapat memberikan stabilitas ekonomi, tetapi juga meninggalkan risiko korupsi dan ketidaksetaraan. Di sisi lain, kebijakan ekonomi privatisasi menawarkan potensi pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, namun juga dapat memunculkan tantangan terkait akses layanan publik dan ketidaksetaraan. Era globalisasi menambah kompleksitas dengan tekanan pasar global yang mempengaruhi kebijakan nasional. Konflik potensial antara dua pendekatan tersebut menyoroti pentingnya mencari keseimbangan yang tepat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan sejalan dengan prinsip-prinsip

keadilan sosial. Kesimpulannya, pengelolaan interaksi antara korporatisme negara dan kebijakan ekonomi privatisasi memerlukan perencanaan dan regulasi yang cermat guna memaksimalkan manfaat ekonomi sambil menjaga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Ari Dwipayana. "Korporatisme Negara dan Privatisasi: Dampak Terhadap Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), (2022): 123-142.
- Dwi Haryono. "Korporatisme Negara dan Privatisasi: Implikasi Terhadap Perekonomian Nasional." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 14(2), (2021): 121-138.
- Kurniawan, N. I. Globalisasi & negara kesejahteraan: perspektif institusionalisme. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada. 2009.
- Muchayat, M. Politik dan ekonomi kebijakan privatisasi badan usaha milik negara (BUMN) (politics and economics of privatization in the state-owned enterprise). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(3), (2017): 369-384.
- Mustofa, A. EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN: KEBIJAKAN PRIVATISASI DAN ALIANSI POLITIK BUMN. Unitomo Press. 2020.
- NEGARA, P. T. Kebijakan publik. 2014.
- Sari, R. P., & Suharto, E. Analisis kebijakan privatisasi BUMN dalam perspektif ekonomi politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), (2018): 1-12.
- Trijono, L. Pembangunan sebagai Perdamaian: rekonstruksi Indonesia pasca-konflik. Yayasan Obor Indonesia. 2007.

Al Ghozaly Irzha Bagus Syahputra, Alya Syifa
Sinaroja, Valiant Rizqi Widyoseno

Wiranta, S. Privatisasi BUMN dan perannya terhadap pembangunan ekonomi nasional: Kasus PT. Garuda. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(1), (2012): 1-20.

Wirawan, A. Analisis dampak privatisasi BUMN terhadap kinerja perusahaan dan perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(1), (2019): 1-10.